DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amri. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.

Anggriawan,T.P. Purwanto, & Wardhani, S.K. (2023). *Pengantar Hukum Perdata*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Darsi, M. (2023). *Teori dan Konsep Restorative Justice dan Penerapannya pada Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan*

Desminar, D. (2021). Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga.

Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2014). Pengaruh Budaya Patriaki terhadap Perceraian. *Malang: Penerbit Tunggal Mandiri*.

Irwansyah. (2023). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mitra Buana Media. Yogyakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama. Jakarta

Mahmud, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Revisi ed.). Jakarta: Kencana

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press

Munir Fuady. (2018). Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep. Rajawali Pers.

Nugroho, S. S. (2022). *Metodologi Riset Hukum*. Universitas Merdeka Madiun.

Rofiq A, (2015). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, A. P. A., Habib, M., & Rizky, A. P. K. (2023). Pengantar Hukum Perkawinan. *PUSTAKABARUPRESS Yogyakarta*.

Sayyida, N. U. (2022). *Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Perkawinan Dengan Mahar Tidak Tunai (Dalam Perspektif Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)

Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan: Penerbit Qiara Media

Sutopo, U., Safira, M. E., & Khasanah, N. U. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik. *CV. Nata Karya*.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2012). *Pluralitas hukum perceraian: Memahami makna, alasan, proses, dan akibat hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat di Indonesia*. Tunggal Mandiri Publishing.

Syaifuddin M, Turatmiyah S, & Yahanan A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

Tihami, M. A., & Sahrani, S. (2018). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap. cet-5. *Depok: Rajawali Pers*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Rights.* Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 61, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359)

Kompilasi Hukum Islam. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

C. Jurnal & Publikasi Ilmiah

Anam, M. K. (2021). Perceraian di depan pengadilan agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi analisis multi disipliner. *Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–32. DOI: https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.**1**-24

Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, *3*(1), 1-14. DOI: https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272

Anggriawan, T. P., Wulandari, S. A., Aliyah, K. K., & Agustina, S. A. (2024). Analisis Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan atas Objek Waris di Pengadilan Agama (Exceptie Van

Onbenveogheid). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(1), 92-97.

Arinda, F., & Rizkillah, R. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi dan dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga narapidana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, *10*, 1-13. DOI: http://doi.org/10.21009/**JKKP**.101.01

Basri, H., Koto, A., & Nelli, J. (2023). Isu-Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan. *Jurnal An-Nahl*, *10*(1), 9-16.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1). DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. (2022). Dispensation of Marriage in The Perspective of Children's Rights: Best Interest of The Children. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *22*(3), 295. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.295-310

Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan dan kewenangan pengelolaan rumah tahanan negara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2).

Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *11*(1).

Daulay, R. M. A. A., Rismawati, S. D., & Ahmad, M. (2023). Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, *1*(1), 1-13. DOI: https://doi.org/10.61682/**restorative**.v1i1.2

Ervina, & Hidayat, Y. (n.d.). *Studi komparatif hak asuh anak dibawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)*. Universitas Al Azhar Indonesia. DOI :

https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4

Hafizah, N. (2023). Ketiadaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Nomor: 418/Pdt. G/2021/PA. Brb).

Haiba, S. N. M., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *1*(2), 151-161.

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1). DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

Handayani, N., Ridwan, M. S., & Sahar, R. (2024). Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pascacerai Gugat. *Jurnal Mahasiswa Hukum Qadauna*, 6(1), 45–60

Handayani, Y. (2020). *Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).

Idris, R. N. (2024). *Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami yang di Penjara di Pengadilan Agama Wates (Studi atas Perkara Nomor 61/Pdt. G/2023/PA. Wt)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Marwan, S. M. A. (2021). Eksistensi pidana penjara seumur hidup di indonesia ditinjau dalam perspektif tujuan hukum pidana modern. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, *13*(1). DOI: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12025

Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, *9*(9).

Mianita, H., Nurjannah, M., Bullah, M. F., Wicaksana, S., & Febi, T. (2020). Dampak stigmatisasi terhadap keluarga narapidana di lingkungan sekolah. *ResearchGate*.

Natsif, F. A. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Risalah*, *12*.

Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(2)

Puspytasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, *35*(2).

Rismawati, S. D. (2023). Keadilan Hukum dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies. *Restorative: Journal of Restorative Justice*, 1(1), 22–35. DOI: https://doi.org/10.61682/**restorative**.v1i1.2

Ruhimat, M. (2020). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di pengadilan agama. *Jurnal 'Adliya*, *11*(1).

Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). A review on Rawls Theory of Justice. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, *1*(1), 29-36

Saraswati, N. L. G., Sugiartha, I. N. G., & Budiasa, I. N. (2024). Efektivitas E-Court sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 35-52

Siregar, D. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap masyarakat. *Jurnal Deputi*, 1(1), 1–10. DOI: https://doi.org//10.54123/**deputi**.v3i2.27

Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Masagi*, *3*(1).

Tanjung, D., Harahap, M. Y., & Fuadi, F. (2023). Penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui putusan Pengadilan Agama Medan (studi analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(2).

Wulandari, D. (2021). *Pelaksanaan* Pasal *70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

Yasniwati, Y. (2023). Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Solusi Penanggulangan Di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 294-305. DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

Yufita, I. D. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya*. Repository UNSRI

D. Wawancara

Wawancara dengan Petugas PTSP Pengadilan Agama Mojokerto Ibu Ani Vintaria,S.H. Pada tanggal 16 April 2025

Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Farhan Hidayat, S.H Pada tanggal 16 Juli 2025

Wawancara dengan narapidana yang menjadi pihak tergugat dalam perkara perceraian di LAPAS Mojokerto kelas II B Pada tanggal 16 April 2024

E. Lain-Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024.). *Hak konstitusional warga negara termasuk mantan narapidana*. url: https://rechtsvinding.bphn.go.id/. Diakses pada 20 Agustus 2025

Darsono. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama. Badilag Mahkamah Agung RI.Url:https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama. Diakses pada 13 Juni 2025

Fahum UMSU. (2024). Perbedaan Tahanan dan Narapidana Dalam Hukum.Url: https://fahum.umsu.ac.id/info/perbedaan-tahanan-dan-narapidana-dalam-hukum/. Diakses pada 29 Juni 2025.

Hukumonline.(2023).Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI.Url: https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/. Diakses pada 29 Juni 2025.

Hukumonline.(2023).Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya.Url:https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062.com. Diakses pada 29 Juni 2025

Hukum Online. Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak Hadir.Url : https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-lt5aaf18303d84a/?utm_source. Diakses pada 20 Agustus 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi Narapidana. Url: https://kbbi.web.id/narapidana. Diakses pada 29 Juni 2025

Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan .(2023). Url: https://www.ditjenpas.go.id/hak-keperdataan-narapidana-dalam-perkara-perdata-hukum-keluarga. Diakses pada 12 Februari 2025

Magister Hukum UMA.(2025). Info Terkait Mengenai Hukum Perceraian.Url: https://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/. Diakses pada 29 Juni 2025

Munawaroh N. (2020). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. Url: https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam- filsafat-hukum lt62e268cc4bb9b/. Diakses pada 1 Mei 2025

Pengadilan Agama Rangkasbitung. (2023). *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*.Url : https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/625-pembagian-harta-bersama-berdasarkan-besaran-kontribusi-suami-istri-dalam-perkawinan. Diakses pada 17 Juni 2025

STIH Adhyaksa. (2023). Justice as Fairness: Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls. Url : https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/. Jakarta. Diakses pada 29 Juni 2025